



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
M A L I L I, 92982

KEPUTUSAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 07 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 77 Tahun 2020, dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Luwu Timur;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270) ;
 3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 4400) ;
 5. Undang – Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
 7. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5/F-04/I/Tahun 2024, tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2024, tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabata Lainnya Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA :

1. Tugas Pokok Pejabat Pembuat komitmen (PPK) :
 - Menetapkan Rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa meliputi :
 1. Spesifikasi Tehnis Barang Jasa/ Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 2. Harga Perkiraan sendiri (HPS)
 3. Menetapkan Rancangan Kontrak
 4. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 5. Menetapkan besaran uang muka 'yang akan dibayarkan kepada Penyedia
 6. Menandatangani Kontrak
 7. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia Barang /Jasa
 8. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak
 9. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang /Jasa kepada PA/KPA
 10. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
 11. Melaporkan Kemajuan Pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran dan Hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap Triwulan.
 12. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh Dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa
 13. Pejabat Pembuat Komitmen Bertanggungjawab secara fisik dan Administrasi serta melaporkan hasil Kegiatan kepada Pengguna Anggaran Dinas pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Luwu Timur pada RKA /DPA Tahun Anggaran 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024 ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan didalamnya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 02 Januari 2024
KEPALA DINAS
Kepala Dinas,



Dra. Hj. PUSPAWATI
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19670308 199402 2 002

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur di Malili
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili
3. Ka. Inspektorat Kab.Luwu Timur di Malili
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. LuwuTimur di Malili
5. Ka. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. LuwuTimur di Malili

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 NOMOR 07 TAHUN 2024
 TENTANG
 SUSUNAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA	JABATAN	KET		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	I DEWA PUTU ALIT SWASTIKA,M.Si	PPK			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan					
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah					
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD					
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah					
	Pendataan dan Pengolahan Admistrasi Kepegawaian					
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan					
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu			
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah			
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan			
	Pengadaan Mebel			
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Atau Kendaraan			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
8	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			
	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan			
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	MARCE LOBO PATA,S.KM	PPK	
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana			
9	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	MARCE LOBO PATA,S.KM	PPK	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			

III	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA			
10	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal			
	Pengendalian Program KKBPK	RAHMAWATI,S.KM	PPK	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana			
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal			
	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			
11	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	MARCE LOBO PATA,S.KM	PPK	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			
	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			
12	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya	SULIATI,SKM MM	PPK	
	Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya			

13	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB			
	Integrasi Pembangunan Lintas sektor di kampung KB	MARCE LOBO PATA,S.KM	PPK	
	Fasilitas Pengelolaan dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung berkualitas			
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
14	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
	Pembentukan kelompok ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS)	RISKA,S.KM	PPK	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
	Advokasi dan Promosi IPK			
15	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi mitra kerja	RISKA,S.KM	PPK	
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, Baduta/balita)			

Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, Baduta/balita)			
--	--	--	--

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 02 Januari 2024
KEPALA DINAS
Kepala Dinas,



Dra. Hj. PUSPAWATI
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19670308 199402 2 002